

Reaktualisasi Nilai Pancasila melalui Model Pendidikan Multikultural Berbasis Ketahanan Ideologi

Penguatan ketahanan ideologi generasi muda merupakan fondasi strategis bagi keberlanjutan ketahanan nasional. Dalam lanskap sosial kontemporer, ancaman terhadap kohesi nasional tidak selalu hadir dalam bentuk konfrontasi terbuka, melainkan melalui pergeseran nilai yang berlangsung perlahan dan nyaris tidak disadari. Sejumlah temuan empiris dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya perubahan persepsi generasi muda terhadap Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.

Survei PPIM UIN Syarif Hidayatullah (2018–2020) mencatat tingginya paparan konten intoleran dan radikal di ruang digital di kalangan pelajar dan mahasiswa. Survei Setara Institute dan INFID (2023) menunjukkan sebagian responden siswa SMA memandang Pancasila bukan ideologi permanen. Survei opini publik Kompas (2025) bahkan mencatat generasi Z sebagai kelompok yang paling banyak memandang Pancasila sebagai nilai yang mulai ditinggalkan.

Temuan tersebut tidak dapat dibaca secara simplistik sebagai penolakan terbuka terhadap ideologi negara, namun mengindikasikan adanya pelemahan internalisasi dan aktualisasi nilai dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perspektif ketahanan nasional, kondisi ini mencerminkan gejala erosi kohesi ideologis yang apabila tidak ditangani secara sistemik berpotensi memperbesar fragmentasi sosial.

Kompleksitas tantangan semakin meningkat dengan masifnya penetrasi teknologi digital yang mempercepat sirkulasi narasi identitas alternatif berbasis agama, etnisitas, maupun ideologi transnasional. Generasi muda hidup dalam ruang informasi yang cair, kompetitif, dan sering kali polaristik. Dalam situasi tersebut, nilai yang tidak mengalami aktualisasi sosial cenderung kehilangan relevansinya.

Selama ini, pendekatan pembinaan ideologi cenderung berorientasi pada aspek normatif dan kognitif melalui kurikulum formal dan kegiatan seremonial. Namun berbagai kajian menunjukkan bahwa pemahaman konseptual tidak selalu berbanding lurus dengan komitmen ideologis. Internalisasi nilai lebih efektif terbentuk melalui pengalaman sosial konkret, khususnya dalam

interaksi lintas identitas yang dikelola secara pedagogis. Dengan demikian, tantangan utama bukan terletak pada kekurangan materi pendidikan Pancasila, melainkan pada keterbatasan ruang praksis yang memungkinkan nilai tersebut dihidupi.

Dalam kerangka pembangunan nasional yang menempatkan penguatan ideologi dan karakter kebangsaan sebagai prioritas utama, kebutuhan akan model pendidikan berbasis pengalaman sosial menjadi semakin relevan. Di sinilah pengalaman empiris SMK Bakti Karya Parigi selama lebih dari satu dekade memberikan preseden strategis.

Sekolah ini mengembangkan model pendidikan multikultural berbasis asrama dengan komposisi siswa yang berasal dari 58 suku di 28 provinsi, termasuk sekitar 10 persen anak pekerja migran Indonesia dari Malaysia. Konfigurasi ini menciptakan tingkat keragaman sosial yang tinggi dan menghadirkan dinamika interaksi yang kompleks. Keberagaman tersebut tidak dibiarkan berjalan tanpa arah, melainkan dikelola melalui desain pedagogis yang menjadikan interaksi lintas budaya sebagai bagian integral dari proses pembelajaran.

Dalam sistem berasrama, peserta didik tidak hanya berbagi ruang kelas, tetapi juga berbagi kehidupan. Musyawarah menjadi mekanisme pengambilan keputusan internal. Gotong royong menjadi praktik rutin. Perbedaan latar belakang menjadi ruang pembelajaran empati. Dalam konteks ini, Pancasila tidak berhenti sebagai teks normatif, melainkan menjadi mekanisme sosial yang mengatur kehidupan bersama.

Proses tersebut membentuk resiliensi sosial—kemampuan untuk mengelola perbedaan tanpa terjebak dalam polarisasi. Dari perspektif ketahanan nasional, kapasitas ini merupakan fondasi preventif terhadap potensi fragmentasi identitas. Praktik ini sekaligus merepresentasikan dimensi harmoni dan toleransi dalam agenda pembangunan nasional, di mana kohesi sosial dibangun melalui interaksi yang terkelola, bukan sekadar imbauan normatif.

Model ini telah berjalan selama sepuluh tahun secara konsisten dan menjadi objek berbagai penelitian akademik serta lokasi magang dan pengabdian perguruan tinggi. Dari sisi tata kelola, pengembangannya didukung oleh skema pembiayaan hibrida melalui partisipasi publik, kemitraan, CSR, serta usaha mandiri. Investasi difokuskan pada penguatan ekosistem: fasilitas

asrama, sarana belajar, dan kesejahteraan guru. Pengalaman ini menunjukkan bahwa desain sistem pembelajaran yang tepat lebih menentukan daripada besaran anggaran semata.

Apabila dibaca dalam kerangka arah pembangunan nasional, model pendidikan multikultural ini memiliki relevansi yang terintegrasi dengan agenda Asta Cita. Pada dimensi penguatan ideologi dan karakter kebangsaan, pendekatan ini menggeser pendidikan kebangsaan dari level retorika menuju praksis sosial. Nilai tidak sekadar diajarkan, tetapi dialami. Internalisasi terjadi melalui pengalaman hidup bersama lintas identitas, sehingga keberagaman berfungsi sebagai mekanisme pencegahan dini terhadap fragmentasi.

Pada dimensi pengembangan industri kreatif, integrasi pendidikan vokasi di bidang penyiaran dan perfilman memberikan ruang ekspresi kebangsaan dalam bahasa generasi digital. Generasi muda tidak hanya menjadi konsumen narasi global, tetapi berpotensi menjadi produsen konten yang merepresentasikan nilai inklusif. Pendidikan, dalam konteks ini, tidak hanya membangun ketahanan internal, tetapi juga berkontribusi pada ekosistem narasi publik nasional.

Pada dimensi penguatan sumber daya manusia, model ini menunjukkan bahwa pendidikan bermutu tidak hanya ditentukan oleh kurikulum teknis, tetapi oleh pembentukan karakter sosial. Sistem asrama yang terkelola, kesejahteraan guru yang diperhatikan, serta integrasi kurikulum formal dan sosial membentuk lingkungan yang kondusif bagi lahirnya SDM unggul yang adaptif dan inklusif.

Pada dimensi pembangunan desa, keberadaan sekolah berbasis desa dengan komposisi siswa lintas provinsi menunjukkan bahwa desa dapat menjadi simpul integrasi nasional. Skema beasiswa dan afirmasi pendidikan memperkuat fungsi sekolah sebagai instrumen mobilitas sosial sekaligus perekat kebangsaan.

Dengan demikian, pengembangan model ini bukan sekadar inovasi pedagogis, melainkan simpul strategis yang mempertemukan agenda ideologi, pembangunan SDM, industri kreatif, desa, dan harmoni sosial dalam satu ekosistem praksis.

Berdasarkan pengalaman empiris tersebut, solusi strategis yang ditawarkan adalah pengembangan model pendidikan multikultural berbasis ketahanan ideologi sebagai pendekatan replikatif dalam

sistem pendidikan nasional, khususnya pada jenjang vokasi dan pendidikan berbasis desa. Replikasi dilakukan secara bertahap melalui dokumentasi praktik baik, penyusunan modul adaptif, serta pengembangan sekolah percontohan di wilayah dengan karakteristik keberagaman yang relevan.

Evaluasi keberhasilan dirancang secara komprehensif dengan mengukur indikator kohesi sosial, kapasitas dialog lintas identitas, dan persepsi terhadap relevansi Pancasila, serta diselaraskan dengan kerangka pembinaan ideologi nasional yang dikembangkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dalam perspektif ketahanan nasional, indikator jangka panjangnya adalah lahirnya warga negara yang resilien terhadap narasi ekstrem dan mampu mengelola pluralitas secara inklusif.

Pada akhirnya, penguatan ketahanan ideologi generasi muda memerlukan pendekatan sistemik yang berbasis praktik dan terukur. Pengalaman selama sepuluh tahun menunjukkan bahwa nilai Pancasila dapat diinternalisasi secara substantif ketika keberagaman tidak dipisahkan, tetapi dipertemukan dalam ruang yang terkelola secara pedagogis.

Dukungan kebijakan dan fasilitasi negara akan memungkinkan model ini berkembang dari praktik kelembagaan menjadi instrumen strategis nasional. Dalam konteks meningkatnya polarisasi global dan penetrasi nilai transnasional, investasi pada ekosistem pendidikan multikultural berbasis praktik nyata merupakan langkah preventif yang rasional dan berbiaya efisien. Pendekatan ini tidak menggantikan kebijakan pembinaan ideologi yang telah berjalan, tetapi memperkuatnya pada level implementasi sosial.

Dengan menjadikan sekolah sebagai laboratorium kohesi nasional, negara menempatkan generasi muda bukan sekadar sebagai objek pembinaan, melainkan sebagai subjek aktif dalam menjaga dan menghidupkan nilai Pancasila dalam kehidupan kebangsaan.